

Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Perumusan Hasil Survei Evaluasi Pengembangan, Penyebarluasan dan Pelaksanaan Aplikasi SIPP Hari Pertama dan Kedua



Berkenaan dengan Memorandum Sekretaris Mahkamah Agung Nomor : 120/SEK/M/10/2017

tanggal 19 Oktober 2017 dan Surat EU-UNDP SUSTAIN

Nomor : 91/CASE/SUSTAIN/X/2017

serta sebagai tindak lanjut dari kegiatan Pengisian dan Pengiriman

Self-Assessment Questionnaire

dalam rangka survey (evaluasi) Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang serentak dilaksanakan oleh 4 (empat) lingkungan Peradilan pada seluruh Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding, maka pada tanggal 21-23 November 2017

EU-UNDP SUSTAIN menyelenggarakan Kegiatan

Focus Group Discussion

(FGD) Perumusan Hasil Survei Evaluasi Pengembangan, Penyebarluasan dan Pelaksanaan Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Hotel Novotel Bandung, Jl.

Cihampelas No.23-25 Bandung.

Sebagai informasi, Kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) Perumusan Hasil Survei Evaluasi Pengembangan, Penyebarluasan dan Pelaksanaan Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang diselenggarakan 3 (tiga) hari ini merupakan satu rangkaian dari Kegiatan *Focus Group Discussion*

(FGD) Penyusunan Instrumen Evaluasi dalam Pengembangan, Penyebarluasan dan Pelaksanaan Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang telah diselenggarakan sebelumnya oleh EU-UNDP SUSTAIN pada tanggal 11-15 September 2017 di Bandung. Mengingat pula telah diimplementasikannya Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pada 4 (empat) lingkungan peradilan sejak versi 3.1.1 - 3.1.5-5 yang telah diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia pada Bulan Mei 2016, dipandang perlu untuk melaksanakan

survey

agar dapat mengukur efisiensi dan efektifitas pengembangan, penyebarluasan dan pelaksanaan Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) selama kurun waktu 1 tahun implementasinya (2016-2017).

Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Perumusan Hasil Survei Evaluasi Pengembangan, Penyebarluasan dan Pelaksanaan Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dibuka oleh Ariyo Bimmo, S.H., LL.M selaku Koordinator Sektor Manajemen Perkara pada EU-UNDP SUSTAIN. Dalam sambutannya, Ariyo Bimmo, S.H., LL.M menyampaikan bahwa

questionnaire

yang dikirim kembali

oleh 4 (empat) lingkungan Peradilan pada seluruh Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding sudah mencapai 90%, memang pada kenyataannya tidak memenuhi pencapaian target 100%, namun keputusan yang dilakukan oleh Tim Evaluator dan EU-UNDP SUSTAIN selaku penyelenggara menegaskan bahwa apapun hasilnya akan disampaikan apa adanya (

"as is"

). Adapun batas waktu pengisian dan pengiriman kembali yang ditetapkan oleh Tim Evaluator dan EU-UNDP SUSTAIN semula dijadwalkan pada 03 November 2017, namun karena masih banyak pengadilan (satker) yang belum mengirimkan maka disepakati adanya perpanjangan pengiriman kembali

questionnaire

tersebut hingga pada tanggal 11 November 2017.

Dalam sambutannya pun,

Ariyo Bimmo, S.H., LL.M selaku Penyelenggaran dan Ketua

Tim Evaluator mengapresiasi lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha

Negara yang mampu mengisi dan mengirimkan kembali Self-Assestment Questionnaire

dalam waktu yang cepat

Lebih lanjut, walaupun hanya mencapai 90%, data *Self-Assestment Questionnaire* yang dihimpun oleh Tim Evaluator diyakini oleh

Ariyo Bimmo, S.H., LL.M

sudah cukup dapat merepresentasikan keadaan Pengadilan (satker) dalam hal pengembangan, penyebarluasan dan pelaksanaan Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). D

ata

Self-Assestment Questionnaire

yang diterima kembali oleh Tim Evaluator sudah dihimpun dan diolah kedalam bentuk statistik dan diagram sehingga datanya menjadi

valid

dan matang, ditambah dengan adanya Lampiran Surat Pernyataan maka hal ini berarti

Self-Assestment Questionnaire

yang diisi dan dikirimkan kembali oleh Pengadilan (satker) dapat dipertanggungjawabkan

kebenarannya (sesuai dengan apa yang terjadi di masing-masing satuan kerja). Setelah

sambutan dari penyelenggara, dilanjutkan dengan pengantar dari Kepala Bagian

Pengembangan Informatika Supriyadi Gunawan, S.Sos., M.M. yang dalam hal ini mewakili

Kepala Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung. Dalam

pengantarnya

Supriyadi Gunawan, S.Sos., M.M. menyatakan bahwa evaluasi dan sumbangsih seluruh

stakeholders

diperlukan dalam mengembangkan Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)

sehingga dapat lebih optimal dan maksimal, karena

Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) sudah menjadi bagian pekerjaan dalam

mengelola, memajemen dan membantu percepatan penyelesaian perkara di Pengadilan

(satker).

Kemudian Supriyadi Gunawan, S.Sos., M.M. juga menyatakan bahwa Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang digunakan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan

Tingkat Banding masih belum mengakomodir seluruh kebutuhan dalam pengelolaan (manajemen) perkara di pengadilan, oleh sebab itu harapannya dalam kegiatan ini seluruh peserta dapat menghasilkan solusi, saran, usulan, masukan yang dapat memaksimalkan dan mengoptimalkan

Aplikasi

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), sehingga

Aplikasi

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) tidak saja sebagai alat yang memudahkan Pengadilan dalam manajemen perkara melainkan juga sebagai layanan yang dapat menyajikan informasi kepada masyarakat khususnya para pencari keadilan. Setelah pengantar dari Kepala Bagian Pengembangan Informatika Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung, dilanjutkan dengan Pengantar dari Kepala Sub-Bagian Data Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Emie Yulianti, S.E., M.E

yang dalam hal ini mewakili Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Urusan Administrasi

. Dalam pengantarnya

Emie Yulianti, S.E., M.E menegaskan bahwa

Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung turut andil dalam melihat sejauh mana implementasi

Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pada Pengadilan Tingkat Pertama maupun Pengadilan Tingkat Banding, bahkan potret

Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) secara keseluruhan di Mahkamah Agung.

Selanjutnya Emie Yulianti, S.E., M.E juga menegaskan dengan adanya kegiatan evaluasi ini seluruh *stakeholders* dapat melihat apa yang seharusnya memang perlu diperbaiki dan perlu dilihat kembali permasalahan-permasalahannya, kemudian dari Biro Perencanaan dan Organisasi juga dapat mengidentifikasi dan mengkomunikasikan apa yang memang seharusnya didukung untuk keberlangsungan Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Kemudian

Emie Yulianti, S.E., M.E juga menyampaikan bahwa baru-baru ini

Biro Perencanaan dan Organisasi diundang dalam kegiatan

Focus Group Discussion

(FGD) kemudahan berusaha dimana

pilot projectnya

merupakan Pengadilan Niaga, dan hingga saat ini terdapat 5 (lima) Pengadilan Niaga. Lanjut,

Emie Yulianti, S.E., M.E menerangkan bahwa

Pemerintah (Presiden Joko Widodo) menargetkan untuk meraih peringkat 40 (empat puluh) di dunia dan kini Indonesia naik dari peringkat 91 (sembilan puluh satu) ke-72 (tujuh puluh dua), adapun salah satu indikator penilaian peringkat tersebut adalah

Judicial Re-process.

Berkenaan dengan

Judicial Re-process

ini apabila dibandingkan dengan proses peradilan di Negara lain, Indonesia masih kalah jauh, terutama dengan Singapura. Dorongan dari Staff Ahli dan Deputi Percepatan Infrastruktur Kementerian Perekonomian Indonesia memberikan kesempatan bagi Mahkamah Agung untuk mendapatkan dukungan dari Negara, terutama pada sektor

Justice Reform

melalui pemanfaatan Teknologi Informatika, salah satunya yaitu melalui Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan juga Sumber Daya Manusia di Bidang Teknologi Informasi.

Setelah sesi pembukaan, kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan *framework* **PIECES** oleh Marisa Eka Putra S.T., M.Eng selaku Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan Pengadilan Negeri Singkawang. Sebagai informasi,

Framework PIECES

dapat digunakan sebagai metoda dalam penyusunan instrumen evaluasi sebuah sistem. Dalam metode

PIECES

terdapat 6 (enam) variabel (aspek) yaitu aspek kinerja, aspek informasi, aspek ekonomi, aspek kontrol dan keamanan, aspek efisiensi dan aspek pelayanan, apabila keseluruhannya disingkat menjadi

PIECES

(
Performance, Information, Economy, Control and Security, Efficiency, Services

). Agenda hari pertama dan hari kedua adalah pemaparan hasil pengolahan

Self-Assestment Questionaire

pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan yang disajikan dalam bentuk data tabulasi, statistik dan diagram. Untuk Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara telah terkumpul 56 (lima puluh enam)

Self-Assestment Questionaire

satuan kerja (Pengadilan Tingkat Pertama dan juga Pengadilan Tingkat Banding) dengan keseluruhan (

overall

)

predikat yang menyatakan : BAIK

.

Apabila predikat tersebut *dibreakdown* menggunakan metode **PIECES**, maka untuk lingkungan **Peradilan Militer dan**

Peradilan Tata Usaha Negara

meraih predikat sebagai berikut :

- Aspek *Performance* : BAIK
- Aspek *Information* : BAIK
- Aspek *Economy* : PUAS
- Aspek *Control and Security* : BAIK
- Aspek *Efficiency* : BAIK
- Aspek *Services* : BAIK

Selanjutnya pada hari pertama dan kedua kegiatan ini diisi dengan diskusi kelompok untuk mengkaji, menelaah dan menyusun analisa berupa narasi dan deskripsi terkait *issue* (sebab dan akibat) dalam proses pengembangan, penyebarluasan dan pelaksanaan Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pada 4 (empat) lingkungan peradilan ditinjau dari segi *performance, information, economy, control and security, efficiency, services* berdasarkan data tabulasi, statistik dan diagram yang bersumber dari *Self-Assestment Questionnaire* yang diisi dan dikirimkan kembali oleh satker (Pengadilan). Adapun kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) Perumusan Hasil Survei Evaluasi Pengembangan, Penyebarluasan dan Pelaksanaan Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dihadiri oleh perwakilan dari Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yaitu :

1. Kolonel Chk Sutrisno Setio Utomo, S.H., M.H. selaku Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta
2. Letnan Kolonel Tri Achmad Baykoni S.H., M.H. selaku Kepala Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin
3. Sudarsono, S.H., M.H. selaku Staf Ahli DitBinganisMinTUN (Hakim Yustisial)
4. Hari Arief Darmawan, S.H. selaku Staff seksi Mutasi Panitera dan Jurusita DitBinganisMinMIL (dan selaku Tim Koordinator SIPP Ditjen Badilmiltun)
5. Stefanus Dwi Putra Medisa, S.Kom selaku Staff Dokumentasi dan Informasi

Kesekretariatan Ditjen Badilmiltun (dan selaku perwakilan Tim Development SIPP)

6. Leni Novianda A S.E., M.Eng selaku Staff Sub Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang (dan selaku Tim Evaluator dalam kegiatan ini)

7. Muhammad Nasrullah, S.Kom selaku Staff Pengelola IT Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar (dan selaku Perwakilan dari Pengelola IT SIPP di Pengadilan)

(@x_cisadane)